

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Studi ini didasari oleh pandangan dan keyakinan bahwa bimbingan dan konseling merupakan komponen layanan pendidikan yang potensial dan kontributif bagi upaya peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi. Sehubungan dengan itu maka alur bahasan latar belakang ini dipusatkan kepada dua tema, yaitu : (1) posisi layanan bimbingan dan konseling dalam upaya meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi dan (2) kondisi layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi serta kebutuhan pengembangannya.

1. Posisi Layanan Bimbingan dan Konseling dalam upaya Meningkatkan Mutu Lulusan Perguruan Tinggi

Masuknya Indonesia dalam era globalisasi dan informasi menuntut masyarakatnya untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Dalam situasi tersebut manusia Indonesia dihadapkan kepada konfigurasi kehidupan untuk di satu sisi tetap berpijak dan mengarah kepada jati diri bangsa, namun di sisi lain dapat bereaksi secara proporsional terhadap perubahan mendunia yang terjadi, termasuk memanfaatkan berbagai peluang yang menyertainya. Strategi yang dikembangkan untuk menghadapi fenomena penduniaan tersebut adalah dengan menempatkan faktor manusia sebagai titik sentralnya (Wardiman Djojonegoro, 1995: 2).

Implikasi yang muncul dari tantangan dan strategi ini adalah perguruan tinggi di Indonesia harus mampu tampil sebagai "pemroses" upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia untuk menghadapi masa depan (Muchtari Buchori, 1994: 63). Begitu seriusnya persoalan ini, sehingga pemerintah melalui Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) menegaskan bahwa salah satu tugas perguruan tinggi adalah mempersiapkan mahasiswa agar mampu menghadapi perubahan dengan cara tetap menegakkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan secara konsisten dan mengembangkan nilai instrumental yang sesuai dengan perkembangan zaman di masa depan (Alwi Dahlan, 1996: 30).

Penekanan dan penegasan tugas tersebut menghendaki agar dinamika pendidikan di perguruan tinggi berpijak pada dua dimensi, yaitu dimensi mahasiswa sebagai subyek didik yang akan dikembangkan dan dimensi masa depan sebagai situasi yang akan dihadapinya. Dalam konteks pemikiran Tilaar (1987: 12) dikatakannya sebagai proses belajar inovatif, yaitu belajar secara antisipatoris dan partisipatoris dengan meletakkan faktor manusia dalam belajar.

Dalam konteks yang berkaitan langsung dengan proses belajar-mengajar, Nimpoeno (1986: 140) menyatakan bahwa proses belajar-mengajar di perguruan tinggi selalu melibatkan mahasiswa sebagai obyek dan subyek. Sebagai obyek,

mahasiswa merupakan fokus dari segala kegiatan pendidikan yang telah dirancang secara terencana dan sistematis. Sedangkan sebagai subyek, mahasiswa diharapkan mampu menguasai standar kompetensi secara komprehensif, baik yang menyangkut kompetensi akademik, kompetensi profesional, maupun kompetensi pribadi.

Sumber pemikiran lain, yaitu rumusan tujuan pendidikan tinggi di Indonesia secara jelas menunjukkan bahwa dalam proses pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa dituntut agar mampu berperan sebagai subyek yang aktif mengembangkan kompetensinya, baik yang menyangkut kompetensi akademik, kompetensi profesional maupun kompetensi spiritual. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, Bab II, pasal 2, ayat (1), menyuratkan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah :

1. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Selanjutnya, dalam ayat (2), dinyatakan bahwa :

Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada :

1. tujuan Pendidikan Nasional;
2. kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;
3. kepentingan masyarakat, serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

Kata "menerapkan, mengembangkan dan menciptakan" dalam rumusan tujuan tersebut menghendaki agar aktivitas mahasiswa sebagai peserta didik tidak hanya berhenti pada peran sebagai "penghayat" ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang dipelajarinya. Mereka dituntut pula agar mampu berperan sebagai "pemroses" ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang dipelajarinya itu melalui kegiatan perkuliahan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Sedangkan kata "berpedoman pada tujuan Pendidikan Nasional; kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan serta prakarsa pribadi" mengandung implikasi bahwa lulusan perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk memiliki kualitas pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan bertanggung jawab sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan dan kemauan menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Dianalisis dari dimensi perguruan tinggi sebagai suatu sistem, kajian di atas menghendaki agar upaya peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi tidak hanya menjangkau penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian saja, melainkan mencakup pula pengembangan kompetensi sosial-pribadinya. Perwujudan dari upaya ini menuntut agar keseluruhan unsur-unsur sistemik pelayanan pendidikan di perguruan tinggi dikembangkan secara selaras,

seimbang dan terpadu. Implikasinya, penyelenggaraan komponen pelayanan pendidikan yang memfokuskan kepada pengembangan dimensi akademis mahasiswa perlu didampingi dan ditopang oleh komponen pelayanan pendidikan yang memusatkan kepedulian kepada pengembangan pribadi, sosial, kematangan berpikir dan sistem nilai serta kemampuan mengantisipasi dan mengambil keputusan secara efektif dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Komponen pendidikan yang dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan di atas adalah layanan bimbingan dan konseling.

Alur pemikiran di atas menunjukkan dengan jelas bahwa sumbangan layanan bimbingan dan konseling terhadap peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi terletak pada kepeduliannya membantu mahasiswa mengembangkan kompetensi sosial-pribadinya sejalan dengan upaya pengembangan kompetensi akademik dan profesionalnya.

2. Kondisi Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi serta Kebutuhan Pengembangannya.

Dalam konteks sistem pendidikan tinggi di Indonesia layanan bimbingan dan konseling bagi mahasiswa telah dilaksanakan secara bervariasi sesuai dengan kondisi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Beberapa perguruan tinggi yang mempelopori berdirinya lembaga bimbingan dan konseling antara lain sebagai berikut.

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, telah merintis layanan bimbingan dan konseling sejak tahun 1965 dan diresmikan berdirinya pada tahun 1968 dengan nama Biro Bimbingan, dengan kedudukan sebagai bagian dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Mulai tanggal 1 Maret 1972 ditingkatkan statusnya menjadi unit yang setingkat dengan fakultas, dengan nama Pusat Bimbingan (Brosur Pusat Bimbingan UKSW Salatiga, 1978). Universitas Gajah Mada mendirikan layanan bimbingan dan konseling pada tahun 1975 dengan nama Unit Bimbingan dan Konseling Mahasiswa Universitas Gajah Mada (Brosur : Unit Bimbingan Konseling Mahasiswa UGM, tanpa tahun terbit). Sedangkan di UNS, berdiri sejak tahun 1977 dengan nama Lembaga Bimbingan dan Penyuluhan UNS Sebelas Maret (Majalah Widya Bhawana, Universitas Sebelas Maret, 1988).

Untuk lembaga pendidikan jenis institut, IPB telah melaksanakannya sejak tahun 1972 dengan nama Team Bimbingan dan Konseling Institut Pertanian Bogor (Dep P dan K, 1979). Menyusul kemudian IKIP Bandung yang berdirinya diresmikan pada tanggal 23 Maret 1981 dengan nama Balai Bimbingan dan Penyuluhan.

Upaya pengembangan dalam skala nasional diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Proyek Normalisasi Kehidupan Kampus pada tahun 1983. Perguruan tinggi yang menjadi sasaran dari upaya pengembangan tersebut adalah :

(a) USU, IKIP Medan dan Kopertis I, (b) UNDIP, IKIP Semarang, dan Kopertis VI, (c) UNIBRAW, IKIP Malang dan Kopertis VII, (d) UNUD, UNRAM, dan Kopertis VIII, serta (e) UNHAS, IKIP Ujung Pandang dan Kopertis IX. Sejak saat itu, lembaga pendidikan tinggi di atas secara formal menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling.

Dalam kurun waktu selanjutnya upaya pengembangan layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi dilaksanakan melalui kegiatan Konvensi Nasional Dosen Pembimbing se-Indonesia pada tanggal 21-23 Juli 1994 di Surakarta. Hasilnya, antara lain menunjukkan data bahwa dalam konteks sistem pendidikan tinggi di Indonesia, layanan bimbingan dan konseling "telah ada" hampir di seluruh perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Negeri. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya masih menghadapi berbagai kendala yang cukup mendasar.

Kendala-kendala yang dimaksud mencakup aspek-aspek :
(a) keberadaan unit layanan belum mantap, (b) keterbatasan fasilitas dan pendanaan, (c) belum terjalin kerja sama yang harmonis dengan unit kegiatan lain, (d) programnya belum dikembangkan secara mendasar dan komprehensif, (e) mahasiswa belum memahami fungsi BK sehingga target populasi layanannya kecil dan terbatas, (f) belum didukung oleh dosen petugas bimbingan yang full-time, (g) kurang didukung oleh mekanisme layanan yang sistemik dan efektif sehingga terpusat kepada pemberian layanan yang bersifat kuratif, dan (h) kurang adanya dukungan dari unsur pimpinan.

Persoalan ini menjadi semakin serius apabila dikaitkan dengan kondisi mahasiswa Indonesia. Data yang dicatat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam Supriadi (1994:1) menunjukkan bahwa proyeksi untuk lima tahun mendatang, jumlah mahasiswa akan terus meningkat. Pada akhir Pelita VI, jumlah mahasiswa akan mencapai 3,2 juta orang. Posisi angka melanjutkan ke perguruan tinggi akan meningkat dari 41% pada akhir pelita V menjadi 49% pada akhir pelita VI. Peningkatan ini membawa konsekuensi bahwa dimensi latar belakang mahasiswa Indonesia akan semakin beragam. Apabila tidak difasilitasi dengan layanan bimbingan yang terencana, kondisi tersebut akan memperbesar peluang terjadinya kesulitan penyesuaian diri dan kelambatan penyelesaian studi mahasiswa.

Dinamika hubungan dosen-mahasiswa dan iklim kampus di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan yang belum mengembirakan. Survey yang dilakukan terhadap 561 mahasiswa di Bandung (Dahlan & Supriadi, 1994) menemukan bahwa hanya 24% mahasiswa yang mengaku aktif berkonsultasi dengan dosen di luar perkuliahan, karena berbagai alasan (segan, dosen sulit ditemui). Di samping itu juga ditemukan bahwa semakin prestisius suatu perguruan tinggi, hubungan dosen dengan mahasiswanya bukan semakin baik, tetapi semakin jelek. Hanya 12%-16% mahasiswa dari dua perguruan tinggi terkemuka di Bandung yang secara teratur berkonsultasi dengan dosen di luar perkuliahan. Belum intensifnya hubungan dosen-mahasiswa ini, memerlukan saluran yang dapat menjadi wahana konsultasi, informasi, pengembangan diri bagi mahasiswa.

Fenomena di atas dapat dimaknai sebagai petunjuk yang mengandung implikasi bahwa pertama, dengan berbagai variasi dan kondisinya, perguruan tinggi di Indonesia telah menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Kedua, untuk dapat memberikan kontribusi yang jelas dan khas dalam upaya meningkatkan mutu lulusan, bimbingan dan konseling di perguruan tinggi perlu dikembangkan menjadi layanan profesional yang terstruktur dalam sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi dan didukung oleh sistem manajemen yang efektif.

B. Masalah Penelitian

Kajian terhadap panorama layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi semakin menguatkan pemikiran dan keyakinan bahwa layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang didukung oleh sistem manajemen yang efektif akan memberikan sumbangan yang strategis bagi upaya peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi. Conny Semiawan (1994:1) mendukung keyakinan ini dengan menyatakan bahwa agar pengakuan terhadap sumbangannya semakin mantap, pengembangan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi hendaknya diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kesiagaan mengantisipasi situasi kehidupan yang diwarnai oleh semakin pesatnya perkembangan iptek dan "derasnya hujan" informasi.

Analisis ini menggulirkan persoalan perlunya pengembangan model layanan bimbingan yang utuh dan aplikatif untuk diterapkan pada perguruan tinggi di Indonesia. Berbagai upaya pengembangan model yang telah dilaksanakan selama ini belum didasarkan kepada kondisi obyektif di lapangan dan belum diupayakan secara kolaboratif sehingga hasilnya masih dihayati sebagai kegiatan yang bersifat instruktif-administratif serta belum memacu motivasi personil bimbingan di lapangan untuk mengembangkannya secara terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam tataran nasional, sekurang-kurangnya ada dua bentuk upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan model layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Kegiatan yang dimaksud adalah, pertama, upaya pengembangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 1983. Upaya ini dimotori oleh tim yang berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Direktorat Mahasiswa Ditjen Pendidikan Tinggi. Secara umum hasil yang diperoleh tim ini adalah diakui dan dikembangkannya unit-unit layanan bimbingan dan konseling pada perguruan tinggi yang menjadi sasaran kegiatan.

Bentuk upaya kedua, adalah Konvensi Nasional Dosen Pembimbing se-Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 21-23 Juli 1994 di Surakarta. Kegiatan ini diselenggarakan

oleh Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Hasilnya, meng-agendakan sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh unit layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang mencakup masalah : (1) visi dan misi, (2) kelembagaan unit layanan, (3) pengembangan target populasi layanan, (4) profesionalitas kinerja dari dosen petugas bimbingan, (5) pengembangan program, (6) mekanisme layanan dan (7) dukungan kebijakan.

Dalam tataran regional untuk lingkup Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilakukan seminar dan lokakarya untuk memantapkan sistem serta meningkatkan efektivitas layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Kegiatan yang melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini dilaksanakan di Semarang pada tanggal 22 Maret 1989. Hasil yang diperoleh dari upaya ini juga belum komprehensif karena strategi pengembangannya tidak melibatkan unsur pimpinan dan tidak didukung data-data lapangan yang lengkap dan akurat.

Mengacu dan mencermati upaya dan persoalan-persoalan di atas, maka studi ini berada dalam kerangka upaya menemukan model layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi, dengan mengkhususkan pada kerangka kerja kolaboratif dan mendasarkan kondisi obyektif di lapangan. Dengan pengkhususan ini maka masalah penelitian ini diformulasikan sebagai berikut : bagaimana model layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang dikembangkan secara kolaboratif dan didasarkan kepada kondisi obyektif di lapangan?

C. Fokus Penelitian

Makna reflektif yang termuat dalam kristal masalah penelitian di atas adalah belum ditemukannya model layanan bimbingan dan konseling yang dikembangkan secara kolaboratif dan didasarkan pada kondisi obyektif lapangan serta layak diterapkan dalam setting perguruan tinggi.

Upaya pengembangan model layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang selama ini dilakukan, baik oleh pemerintah maupun organisasi profesi, cenderung belum melibatkan secara aktif dosen petugas bimbingan di lapangan dan belum mendasarkan kepada kondisi obyektif yang ada di kampus. Akibatnya, di samping dalam beberapa hal memberikan dampak riil yang segera dapat diamati hasilnya, sering memunculkan dampak negatif, seperti, para petugas bimbingan merasa "tidak memiliki" dan model yang dikembangkan kurang "membumi" serta kurang memacu motivasi untuk mengembangkannya.

Didekati dari konsep penelitian partisipatoris, maka studi ini menetapkan kerangka kerja pengembangan sumber daya manusia dengan melibatkan masyarakat lapangan sebagai basis dan sentral dari seluruh proses kegiatan penelitian. Kerangka kerja ini diajukan sebagai upaya meningkatkan motivasi dan etos kerja dosen petugas bimbingan ke arah pengembangan layanan bimbingan dan konseling yang profesional, dengan mendasarkan kepada kondisi obyektif

di lapangan. Dalam proses penelitian ini peran serta dosen petugas bimbingan di lapangan merupakan titik sentral dan pemegang kunci terhadap keseluruhan kegiatan yang diprogramkan.

Pendekatan konsep penelitian partisipatoris di atas mengarahkan fokus penelitian ini kepada upaya penataan dan pengembangan model layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang dikembangkan secara kolaboratif dengan personil di lapangan dan didasarkan kepada tiga komponen kondisi obyektif di lapangan, yaitu (1) pencapaian tugas perkembangan mahasiswa, (2) lingkungan perkembangan mahasiswa, dan (3) implementasi aktual layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi.

D. Identifikasi Pertanyaan Penelitian

Dengan menetapkan kerangka kerja penelitian partisipatoris sebagai upaya untuk mendekati masalah penelitian ini, maka pertanyaan penelitian pada konteks empirisnya dipertajam sebagai berikut: bagaimana model layanan bimbingan dan konseling diperguruan tinggi yang dikembangkan secara kolaboratif dan didasarkan kepada kondisi obyektif di lapangan?. Secara operasional, pertanyaan penelitian ini diidentifikasi menjadi tiga tahapan sebagai berikut.

Tahapan pertama berhubungan dengan persoalan kondisi obyektif di lapangan. Pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana deskripsi kondisi obyektif pencapaian tugas-tugas perkembangan mahasiswa?
2. Bagaimana deskripsi kondisi obyektif lingkungan perkembangan mahasiswa?
3. Bagaimana deskripsi kondisi obyektif implementasi aktual layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi?

Tahapan kedua berhubungan dengan masalah rumusan model hipotetik layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang dikembangkan secara kolaboratif dan didasarkan kepada kondisi obyektif di lapangan. Pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana rumusan model hipotetik layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang dikembangkan berdasarkan kondisi obyektif di lapangan?
2. Bagaimana kerja kolaboratif dengan personil bimbingan di lapangan dalam menguji kelayakan model hipotetik?

Tahapan pertanyaan ketiga berhubungan dengan rumusan model "akhir" layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Bagaimana hasil kerja kolaboratif dengan personil bimbingan di lapangan dalam melaksanakan uji coba model layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi?
2. Bagaimana rumusan model "akhir" layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang dikembangkan berdasarkan hasil implementasi?

E. Tujuan Penelitian

Produk akhir studi ini adalah menemukan model layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang dikembangkan secara kolaboratif dan didasarkan kepada kondisi obyektif di lapangan. Untuk mencapai tujuan ini mula-mula dipotret kondisi obyektif di lapangan, yang meliputi pencapaian tugas perkembangan mahasiswa, lingkungan perkembangan mahasiswa, dan implementasi aktual layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Berdasarkan kondisi obyektif tersebut kemudian dirumuskan model hipotetik layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi.

Kadar kelayakan model hipotetik ini dianalisis secara kolaboratif dengan personil bimbingan dan unsur pimpinan perguruan tinggi di lapangan. Kegiatan selanjutnya adalah uji coba model yang juga dilaksanakan secara kolaboratif dengan personil bimbingan dan konseling di lapangan. Berdasarkan hasil uji coba tersebut kemudian dirumuskan model "akhir" layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi.

Kerangka tujuan penelitian di atas menunjukkan bahwa secara umum, studi partisipatoris ini ditujukan untuk menata kerangka kerja dan merumuskan model layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang dikembangkan secara kolaboratif dan didasarkan kepada kondisi obyektif di lapangan. Sedangkan secara rinci, studi ini diarahkan untuk mencapai tiga tahapan tujuan sebagai berikut.

Tahapan pertama menyangkut persoalan kondisi obyektif di lapangan. Tujuan empiris yang hendak dicapai adalah, menemukan deskripsi:

1. kondisi obyektif pencapaian tugas-tugas perkembangan mahasiswa;
2. kondisi obyektif lingkungan perkembangan mahasiswa;
3. kondisi obyektif implementasi aktual layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi.

Tahapan kedua menyangkut persoalan penyusunan rumusan model hipotetik layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang dikembangkan secara kolaboratif dan didasarkan kepada kondisi obyektif di lapangan. Tujuan empiris yang hendak dicapai adalah, menemukan:

1. rumusan model hipotetik layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang didasarkan kepada kondisi obyektif di lapangan.
2. pola kerja kolaboratif dengan personil bimbingan di lapangan dalam menguji kelayakan model hipotetik.

Tahapan tujuan ketiga berhubungan dengan rumusan model "akhir" layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Tujuan empiris yang hendak dicapai adalah, menemukan :

1. hasil kerja kolaboratif dengan personil bimbingan di lapangan dalam melaksanakan uji coba model layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi;
2. rumusan model "akhir" layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi yang dikembangkan berdasarkan hasil uji coba.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Sebagai studi pengembangan model yang menggunakan pendekatan partisipatif dan didasarkan kondisi obyektif di lapangan, sumbangan konseptual yang diberikan oleh penelitian ini adalah kesejajaran konsepnya dengan pendekatan bimbingan preventif-perkembangan. Keduanya bertolak dari konsep dan pendekatan yang menekankan subyek layanan sebagai dasar pengembangan program dan didasari oleh asumsi bahwa perkembangan diri yang optimal terjadi melalui interaksi yang dinamis antara individu yang sedang berkembang dengan lingkungannya. Oleh karena itu temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut.

- a. Pengembangan teori, konsep, dan pendekatan bimbingan dan konseling sebagai layanan yang lebih terstruktur dan sistematis serta berlandaskan kepada perkembangan pribadi manusia dalam keragaman budaya dan lingkungannya.
- b. Penemuan dasar-dasar konseptual bagi pengembangan model layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi.
- c. Penemuan dasar-dasar konseptual yang mempunyai implikasi metodologis bagi studi tentang pengembangan model layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi dengan berbagai variabel yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut.

- a. Pengungkapan deskripsi kebutuhan dan perkembangan mahasiswa serta potensi, peluang, dan tantangan lingkungannya sebagai upaya pemahaman sistem kehidupan psikis dan sosialnya. Pemahaman aspek ini penting karena akan menjadi dasar pengembangan model layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi menuju ke arah layanan yang lebih bermutu.
- b. Kerangka kerja dalam pengembangan model ini sangat menekankan inisiatif dan kerja sama dengan segenap sivitas akademika, khususnya unsur pimpinan, dosen petugas bimbingan, dan mahasiswa. Kondisi ini akan memantapkan kesadaran dan motivasi bahwa layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi merupakan unit layanan yang melibatkan semua unsur sivitas akademika dan menuntut pengembangan secara terus menerus.
- c. Perumusan model "akhir" yang dikembangkan melalui proses uji kelayakan dan uji coba kolaboratif serta didasarkan kepada kondisi obyektif di lapangan dapat dijadikan alternatif strategi untuk mengatasi kendala-kendala yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling pada perguruan tinggi di Indonesia. Di sisi lain, hasil ini juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar dan pedoman untuk mengembangkan model sistem layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi secara terus menerus pada waktu-waktu mendatang.